

Pemerintah perlu melakukan antisipasi kemungkinan munculnya mudik lokal pada Hari Raya Idul Fitri 1441H mendatang. Mudik lokal yang dimaksud adalah bepergian untuk silaturahmi secara fisik kepada kerabat ataupun saudara yang jaraknya tidak jauh, misalkan lintas wilayah di dalam Jabodetabek. Hal ini mengingat kegiatan seperti ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat terutama setelah selesai Sholat Ied. "Tradisi biasanya tidak mudah begitu saja dihentikan walaupun sifatnya sementara, seperti halnya mudik jarak jauh yang selama ini kita lihat.

Beberapa faktor bisa saja mendorong hal itu terjadi, misalnya euphoria yang muncul setelah menyelesaikan ibadah sebulan penuh. Apalagi ibadah yang biasanya dilakukan di masjid sejauh ini hanya bisa dilakukan di rumah. Selain itu bisa saja masyarakat merasa hal yang mereka lakukan wajar-wajar saja bukan termasuk kegiatan yang perlu dibatasi. Sementara apabila banyak masyarakat yang melakukan hal ini maka terbuka lebar-lebar kemungkinan penyebaran virus corona covid-19. "Saat ini khususnya di Jakarta dinyatakan peningkatan kasus covid-19 sudah mulai melambat, jangan sampai hal ini juga membuka kelonggaran masyarakat untuk melakukan silaturahmi fisik pada hari raya Idul Fitri.

Faktor lain yang dapat mendorong masyarakat melakukan mudik lokal adalah selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat masih dapat menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum untuk lintas wilayah di dalam Jabodetabek asal memenuhi syarat pembatasan dan protokol kesehatan. Menurut kami, sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan transportasi selama PSBB di wilayah Jabodetabek, karena sifat PSBB adalah pembatasan, maka transportasi juga tidak dihentikan sama sekali tetapi dilakukan pembatasan. "Namun masyarakat perlu kembali diingatkan bahwa transportasi masih berjalan dengan pembatasan itu untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dalam PSBB.". INSTRAN berpendapat bahwa kunci untuk mengantisipasi mudik lokal lintas wilayah di Jabodetabek ada pada pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing pemerintah daerah di Jabodetabek harus memiliki ketegasan untuk meminta masyarakat tidak melakukan mudik lokal atau silaturahmi fisik pada Hari Raya Idul Fitri. "Ketegasan tersebut harus disosialisasikan mulai saat ini kepada seluruh masyarakat di penjuru Jabodetabek".

Sosialisasi yang dilakukan akan lebih efektif tentunya apabila melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh keagamaan. Mudik atau silaturahmi sebenarnya merupakan bagian kegiatan sosial budaya, dimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, kegiatan sosial budaya merupakan salah satu kegiatan yang perlu dihindari agar tidak terjadi kerumunan. Namun kegiatan mudik dan silaturahmi ini meski kegiatan sosial budaya memang merupakan turunan langsung dari kegiatan keagamaan yaitu Puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Kegiatan ibadah keagamaan sendiri sudah banyak dilakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan, misalnya peniadaan sementara kegiatan ibadah di masjid seperti sholat berjama'ah, sholat jum'at, sholat tarawih ataupun pengajian sehingga masyarakat beribadah di rumah masing-masing, Oleh karena itu sudah sewajarnya masyarakat juga menahan diri dan patuh untuk tidak melakukan mudik lokal atau silaturahmi fisik pada Hari Raya Idul Fitri.

Masyarakat masih dapat melakukan silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tidak akan mengurangi hakekat dari silaturahmi. Menahan diri untuk tidak bersilaturahmi secara fisik demi mencegah meluasnya wabah korona di wilayah Jabodetabek adalah tindakan cerdas yang perlu dipresiasi semua warga. Demi kelangsungan hidup bersama yang lebih lama dan bangkitnya kembali kegiatan ekonomi, maka kita tahan dulu keinginan kita untuk

bersilaturahmi fisik selama masa Idul Fitri 1441 H ini.

Jakarta, Mei 2020 KETUA INSTRAN

DARMANINGTYAS